

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI PROVINSI BANTEN

Siti Maemunah¹, Siti Mardiana², Wahyu Tirta Wardani³, Anis Fauzi⁴
UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: Mae64854@gmail.com; mardianasiti02032@gmail.com;
wahyu.tw02@gmail.com; anis.fauzi@uinbanten.ac.id.

ABSTRAK

Dua kegiatan pembelajaran utama dalam kurikulum merdeka adalah kegiatan kokurikuler seperti proyek penguatan profil siswa Pancasila, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik dan kegiatan intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran (Amalia, Sulastri, and Nurjayadi, n.d.). Ketimpangan akses dan kesenjangan digital menjadi masalah serius yang dapat menghambat implementasi kurikulum Merdeka. Efektivitas kurikulum dipengaruhi tidak hanya oleh desainnya tetapi juga oleh manajemen perubahan dan taktik yang digunakan untuk membantu unit pendidikan dan guru dalam mempraktikkannya, oleh karena itu perencanaan kebijakan harus menyadari kompleksitas. Kesenjangan atau ketimpangan digital dan akses yang tidak merata adalah masalah utama yang mungkin menghambat penerapan kurikulum Merdeka (Armando, Faizah, and Prawesti 2023). Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi sarana pengajaran inovatif yang meningkatkan sistem pendidikan Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, sesuai analisis yang dilakukan. Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pertumbuhan kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan siswa, dapat berkontribusi pada produksi generasi yang lebih siap untuk memenuhi tantangan kontemporer. Namun masih ada kendala dengan implementasi Kurikulum Merdeka, seperti kesiapan guru dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, untuk menuai manfaat sebesar-besarnya bagi pendidikan Indonesia, Kurikulum Merdeka harus terus dinilai dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Provinsi Banten

PENDAHULUAN

Pembuatan kurikulum di era Industri 4.0 merupakan salah satu masalah yang dihadapi sekolah dalam proses belajar mengajar. Lulusan harus memiliki kemampuan literasi baru, seperti literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berpusat pada budi pekerti luhur (Hr and Wakia 2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menciptakan Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk mengatasi masalah pembelajaran yang telah berlangsung lama dan semakin memburuk sebagai akibat dari pandemi. Rendahnya hasil belajar siswa, terutama dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca, adalah ciri khas dari krisis ini. Variasi yang luas dalam kualitas pembelajaran antar wilayah dan kategori sosial ekonomi adalah ciri lain dari krisis pembelajaran (Yogi Anggraena, Nisa Felicia, et al., Februari 2021). Bagi pemerintah, pendidikan merupakan langkah penting dalam membangun bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa salah satu dari sekian banyak tujuan pemerintah Indonesia didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa - peserta didik, Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, dan satu sama lain - agar menjadi manusia yang sehat, cerdas, kompeten, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan membentuk budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Tuntutan akan berbagai kemajuan di bidang pendidikan semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi (Susilowati, n.d., juli 2022).

Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam arti terbatas, kurikulum adalah bermacam-macam disiplin ilmu yang berbeda yang diajarkan kepada siswa melalui apa yang dikenal sebagai "proses pembelajaran." (Khaeroni, & Sobri., November 2021). Sebagai konsekuensi dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia mengembangkan Kurikulum Merdeka, sebuah

pendekatan pendidikan yang inovatif. Gagasan pendidikan yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka ini berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan, kemandirian, dan inovasi pada diri siswa. Kurikulum Merdeka mengambil pendekatan yang berbeda dari kurikulum standar dalam upaya menumbuhkan lingkungan belajar yang lebih menantang dan efektif. (Syahbana et al. 2024). Penerapan kurikulum dalam keadaan khusus dianggap tidak cukup untuk menutup kesenjangan pembelajaran, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung selama wabah global Covid-19, yang sebagian besar berdampak pada Indonesia, inilah yang disebut sebagai jeda pembelajaran. Hampir semua aspek kehidupan manusia mengalami perubahan akibat wabah Covid-19. Keadaan ini juga telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bentuk pengajaran tatap muka atau offline-to-online. Banyak pihak yang merasa tidak siap untuk menerima bahwa pembelajaran sekarang harus dilakukan secara online sebagai akibat dari transisi yang mendadak. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya sejumlah masalah di bidang pendidikan, termasuk kesulitan siswa dalam memahami konten kursus dan menurunnya atau bahkan tidak adanya motivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran (Rohimat, Sanusi, and Munthahanah 2022).

Metode Penelitian

Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini (Azza El Darman 2021) menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pendekatan untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan pemeriksaan hipotesis dari berbagai literatur terkait penelitian. Studi literatur penelitian dibagi menjadi empat tahap: mengumpulkan perlengkapan, membuat daftar pustaka, menjadwalkan waktu, dan membaca atau mendokumentasikan sumber. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian dan pembuatan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Untuk mendukung klaim dan pemikiran mereka,

sumber pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi diperiksa secara kritis dan perlu dieksplorasi secara menyeluruh (Adlini et al. 2022).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti *pelaksanaan* atau *penerapan*. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut definisi ini, mempraktikkan sesuatu melibatkan prosedur yang panjang yang berujung pada implementasi kebijakan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi, proses penerapan kebijakan ke dalam tindakan adalah hal yang pada akhirnya menentukan seberapa penting kebijakan tersebut secara keseluruhan, bahkan dalam hal pendidikan. Hal ini menyiratkan bahwa jika proses implementasi tidak diikuti, pengembangan kebijakan akhir, tidak peduli seberapa bagus, menjadi tidak berguna. Mengimplementasikan kebijakan adalah satu langkah dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). (Elih Yuliah n.d., 2020).

Menurut *Carl Friedrich* (Dalam Khaeroni dan Sobri., November 2021) menyatakan bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam situasi tertentu yang menawarkan peluang dan tantangan untuk dieksploitasi dan diatasi dalam rangka mencapai tujuan atau memenuhi maksud tertentu. *Carl Friedrich* mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Pada kenyataannya, proses implementasi kebijakan sangat rumit sehingga berbagai kepentingan yang berbeda sering kali ikut campur dan menjadikannya panas secara politis. Proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*) dapat digunakan untuk mengukur atau mengamati seberapa baik sebuah kebijakan diimplementasikan yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat

berjalan efektif. Pertama, sejauh mana kebijakan yang ada saat ini telah memasukkan elemen-elemen yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi digunakan untuk mengevaluasi ketepatan kebijakan tersebut. Kedua, kesesuaian kebijakan dengan sifat masalah yang akan ditangani ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dibentuk. Ketiga, apakah lembaga yang membuat kebijakan tersebut memiliki kekuasaan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan sifat kebijakan tersebut. (Azza El Darman., 2021).

Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam suatu aktivitas yang memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap. Esensi implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi lebih dari sekedar aktivitas, tetapi suatu tindakan yang terencana dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa implementasi adalah suatu rangkaian tindakan yang terencana dan dilakukan berdasarkan pedoman serta dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tanpa adanya keterkaitan dengan objek lain, implementasi tidak dapat berfungsi dengan baik (Susilowati, n.d., Juli 2022). Perlu digarisbawahi bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam struktur kebijakan secara keseluruhan, karena dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan secara keseluruhan berdasarkan seberapa baik atau buruknya tujuan yang ingin dicapai. Logika top-down digunakan dalam implementasi kebijakan, yaitu menurunkan atau menginterpretasikan pilihan-pilihan yang masih abstrak atau makro menjadi pilihan-pilihan yang konkret atau mikro. Sebaliknya, proses perumusan kebijakan mengikuti logika bottom-up, dimana pemetaan kebutuhan publik atau pertimbangan tuntutan lingkungan menjadi prioritas utama, kemudian berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dicari dan dipilih sebelum proposal dibuat dan disetujui (Khaeroni dan Sobri., November 2021).

Teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkah-langkah dalam implementasi, faktor-faktor dalam implementasi kebijakan, serta tantangan dan hambatan dalam keberhasilan implementasi kebijakan merupakan beberapa aspek dari proses tersebut yang relevan dan perlu

mendapat perhatian. Menetapkan pedoman merupakan tujuan dari implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Ada prosedur yang harus diikuti, taktik dan teknik tertentu yang harus digunakan, dan sejumlah persyaratan kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi selama mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Serupa dengan hal ini, kebijakan pendidikan (Elih Yuliah n.d., 2020).

B. Kurikulum Merdeka

Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu *curriculum*, artinya *a running course atau a race course, especially a chariot race course*. Sedangkan dalam bahasa Prancis, yaitu *courier* artinya berlari (*to run*) istilah tersebut digunakan dalam bidang olahraga yang artinya kurikulum sebagai jarak yang harus ditempuh (dari *star* sampai *finish*) oleh pelari pacuan kuda untuk mendapatkan medali atau penghargaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aktualisasi Kurikulum Merdeka untuk menyempurnakan tumbuhnya pendidikan karakter pada mahasiswa melalui profil mahasiswa Pancasila-yang memiliki enam dimensi yang masing-masing digali secara mendalam pada setiap elemennya-dapat dilihat sebagai implementasi kurikulum untuk sementara. Hal ini meliputi kemandirian, berpikir kritis, kreativitas, keberagaman global, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan gotong royong (Susilowati, n.d., Juli 2022).

Melalui penerapan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, kurikulum pembelajaran mandiri kementerian ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap, bakat, dan minat mereka di bidang akademik dan non-akademik. Jika sekolah mengadopsi kurikulum ini, diharapkan sekolah dapat memberikan perubahan yang lebih fleksibel pada proses pembelajaran tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran itu sendiri (Seif Malik Aziz n.d., Juni

2023). Kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi (2004), kurikulum tingkat satuan pendidikan (2006), kurikulum 2013 (2013), dan kurikulum otonom (2022) adalah upaya pengembangan kurikulum pertama di Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, memperkenalkan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai bentuk pembaruan kurikulum 2013. Kurikulum ini sebelumnya dikenal dengan nama Kurikulum Prototipe. Kurikulum Prototipe, yang merupakan versi penyederhanaan dari Kurikulum 2013 dengan sistem pembelajaran berbasis proyek-lebih populer dengan sebutan Project Based Learning-diambil dari pintek.id. (yogi anggraena, nisa felicia, et all., februari 2022)

Modul pengajaran adalah salah satu sumber daya utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para pendidik agar berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satu latihan untuk mempraktikkan Kurikulum Merdeka dan Proses Pembelajaran di kelas adalah dengan membagikan modul pengajaran (Wahyu Fatimah n.d., Maret 2023). Kurikulum Merdeka Belajar, seperti yang didefinisikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, adalah program pembelajaran yang menggunakan metode bakat dan minat. Siswa dan mahasiswa dapat memilih kelas yang ingin mereka pelajari berdasarkan minat dan bakat mereka ketika kurikulum ini diterapkan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan pengalaman belajar intrakurikuler yang beragam kepada para siswa. Kurikulum ini didasarkan pada filosofi IKM, yang menekankan pada penghargaan terhadap potensi manusia, perkembangan individu (progresivisme), dan proses pengalaman belajar (konstruktivisme). Kurikulum ini disusun untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kompetensi mereka. Kurikulum ini pada dasarnya dibuat sebagai kerangka kerja yang lebih mudah beradaptasi untuk pembelajaran, dengan penekanan pada komponen-komponen utama dan pertumbuhan karakter dan kemampuan siswa, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Widya Rizky Pratiwi n.d., April 2023).

Dokumen-dokumen berikut ini memberikan poin-poin kebijakan nasional di bidang pendidikan yang menjadi dasar pembuatan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Perubahan struktur kurikulum menurut tingkat dan jenis pendidikan. Karena kurikulum adalah "jantung" pendidikan dan terus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah harus terus memperbarui sistem pendidikan nasional dengan mempertimbangkan bidang ilmu dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum UU No. 20 Tahun 2003. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang kemudian dikembangkan oleh kelompok atau unit pendidikan individu dan komite sekolah/madrasah berdasarkan kebutuhan masing-masing. Komite-komite ini bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan layanan pendidikan atau kantor departemen agama distrik/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah,

dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PP No. 57 Tahun 21. Akibatnya, kurikulum saat ini dapat dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan dalam standar pendidikan nasional, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan curriculum.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. The National Medium-Term Development Plan (MDP), which is organized every five years, is formulated using Law No. 17 of 2007 on Long-term National Development Plans (RPJPN) 2005-2025 as the foundation. The RPJMN was used as a guide by ministries and institutions when creating the Strategic Plan of Ministries and Institutions (Renstra-K/L). Local governments also took into account the RPJMN when creating and modifying their own regional development plans to align with national development objectives. (Yogi Anggraena, Nisa Felicia, et al., 2021)

Dalam kurikulum Merdeka, konsep pembelajaran bebas dari Nadiem Makarim didorong oleh keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa menjadi beban dengan mencapai skor atau skor tertentu. Pohon-pohon Politik Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ditempatkan di pameran Kementerian Pendidikan di hadapan kepala-kepala layanan pendidikan provinsi, distrik/kota Indonesia, Jakarta, 11 Desember 2019. Ada empat kebijakan baru dari Kendikbud RI, yaitu:

- Survei Karakter dan Penilaian Kompetensi Minimum akan menggantikan Ujian Nasional (UN). Berdasarkan praktik terbaik dari tes PISA, evaluasi ini menempatkan penekanan yang kuat pada membaca dan pemikiran numerik. Penilaian ini akan diberikan kepada siswa di kelas 4, 8 dan 11, tidak seperti PBB, yang diberikan pada akhir tahun akademik. Diperkirakan bahwa hasilnya akan memberikan informasi kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya sebelum siswa lulus.

- Sekolah akan menerima Ujian Sekolah Standar Nasional (USBN). Kemendikbud mengklaim bahwa sekolah memiliki kekuatan untuk memilih jenis penilaian, termasuk menulis tugas, portofolio, dan jenis tugas lainnya.
- Membuat Rencana Implementasi Pembelajaran (RPP) lebih sederhana. RPP cukup, menurut Nadiem Makarim, untuk membuat satu halaman. Diperkirakan bahwa dengan menyederhanakan administrasi, waktu instruktur dapat dihabiskan lebih baik pada kegiatan instruksi dan pengembangan kompetensi.
- Sistem zonasi diperluas untuk penerimaan siswa baru (PPDB) (not include the 3T region). Siswa yang telah menyelesaikan rute keberhasilan dan afirmasi disediakan dengan opsi tambahan melalui sistem PPDB. (Hr and Wakia 2021).

Mengutip dari buku karya Leli Halimah “Curriculum is the heart of education” (Dalam Susilowati, n.d., Juli 2021) Ini mendukung klaim Klein bahwa kurikulum memainkan peran penting dalam semua upaya pendidikan. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara guru dan siswa serta antara mereka dan sumber daya dan pengaturan adalah komponen utama dari setiap kegiatan pendidikan. Kurikulum adalah inti dari pendidikan dalam arti yang paling mendasar, yang berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan instruksional sekolah berputar di sekitar rencana yang dibuat dalam kurikulum. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan sekolah direncanakan sesuai dengan kurikulum. Akibatnya, kurikulum berfungsi sebagai dasar dan panduan untuk kegiatan instruksional. Kurikulum perlu dievaluasi terus-menerus untuk dimodifikasi untuk mencerminkan terobosan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar (Yogi Anggraena, Nisa Felicia, et al., Februari 2021).

C. Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Provinsi Banten: Kompleksitas Dan Ketimpangan

1. Kompleksitas

Secara intuitif, persamaan dari kompleksitas adalah “rumit”, atau “sulit”. Antonimnya meliputi “sederhana”, “dipahami dengan baik”, dan “lugas”. Istilah ini memiliki interpretasi berbeda dalam domain pengetahuan berbeda, seperti komputasi, sistem, dan kompleksitas biologis (Bar-Yam 1997). Dalam literatur bisnis, hal ini sering kali merupakan “keadaan antara keteraturan dan kekacauan” (Kurtz dan Snowden 2003). Sistem yang kompleks adalah sistem di mana setidaknya dua bagian berinteraksi secara dinamis untuk berfungsi secara keseluruhan (Serrat 2010). Efektivitas kurikulum dipengaruhi tidak hanya oleh desainnya tetapi juga oleh manajemen perubahan dan taktik yang digunakan untuk mendukung unit pengajaran dan pendidik yang menerapkannya, oleh karena itu perencana kebijakan harus menyadari kompleksitasnya.

Mengenai implementasi kurikulum otonom, para peneliti melakukan wawancara dengan masing-masing kepala sekolah menggunakan serangkaian sepuluh pertanyaan. Distrik Banten berfungsi sebagai lokasi studi. Sembilan pemimpin sekolah diwawancarai, dan hasilnya menunjukkan bahwa sementara 33% pemimpin memahami implementasi kurikulum otonom, 67% dari mereka sudah melakukannya. Meskipun keputusan berubah tergantung pada keadaan dan ketersediaan sumber daya manusia, kepala sekolah percaya bahwa sekolah 100% siap untuk melaksanakan kurikulum otonom (Suwardi 2023). Berikut adalah karakteristik utama kurikulum untuk pembelajaran otonom yang memfasilitasi pemulihan pembelajaran: 1) Pembelajaran berbasis proyek untuk memupuk karakter dan keterampilan lunak sesuai dengan profil siswa Pancasila 2) Berhati-hatilah dengan sumber daya yang diperlukan untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan matematika.Kebebasan bagi para pendidik untuk menerapkan instruksi yang disesuaikan berdasarkan kemampuan siswa, memodifikasi lingkungan, dan memuat lokasi.(Nafi'ah, Faruq, and Mutmainah, n.d.)

Di Indonesia, reformasi kurikulum merupakan proses yang selalu berubah. Kurikulum telah diubah selama bertahun-tahun, tetapi masih belum diterima secara universal sebagai cara terbaik untuk mendidik siswa. Kurikulum bersifat dinamis dan harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan masyarakat yang terus berubah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi baru-baru ini memperbaiki kurikulum dengan memperkenalkan kurikulum mandiri untuk tingkat dasar hingga menengah. Perubahan dan perbaikan kurikulum merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar pendidikan di suatu negara. Dua komponen utama dari kurikulum independen adalah kegiatan ko-kurikuler, yang merupakan proyek yang meningkatkan resume siswa dan berhubungan dengan standar kompetensi yang harus dimiliki lulusan, dan kegiatan intrakurikuler, yang berhubungan dengan akses belajar yang harus dimiliki siswa di setiap mata Pelajaran. (Kepmendikbudristekdikti, 2022) dalam (Amalia, Sulastri, and Nurjayadi, n.d.)

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan dalam proses pengembangan kurikulum: 1. Baik, mudah dimengerti, dan sederhana untuk diterapkan 2. Penekanan pada karakter dan kompetensi masing-masing peserta didik 3. Fleksibilitas 4. Selaras 5. Bergotong Royong 6. Menyoroti hasil penelitian dan pengembangan. Kurikulum Merdeka telah diterapkan secara bertahap dalam Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah SMK Pusat Keunggulan. Implementasi strategi ini telah mengungkapkan beberapa isu, antara lain: SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik nasional maupun internasional. Sesuai dengan kondisi geografis, kurikulum ini juga dapat diterapkan oleh sekolah-sekolah yang berlokasi baik di pedesaan maupun perkotaan. Kesimpulan penelitian menunjukkan berbagai pendekatan yang digunakan di kedua sekolah dengan sumber daya yang cukup dan sekolah dengan beberapa batasan. Kurikulum Merdeka mendesak instruktur untuk terus memberikan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan kepentingan terbaik siswa mereka untuk mempromosikan praktik yang sangat baik di unit pendidikan. Intinya, tidak ada kurikulum di Indonesia

yang memenuhi persyaratan semua pendidik dan siswa. Meskipun demikian, instruktur memiliki kelonggaran untuk menawarkan pembelajaran berorientasi konteks yang menguntungkan bagi siswa karena fleksibilitas kurikulum dalam mengajar dan menciptakan metodologi pembelajaran. Kurikulum yang mudah beradaptasi dan inovatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan siswa dan peristiwa terkini, itu juga dapat beradaptasi dengan masalah dunia kita yang selalu berubah. (Yogi Anggraena, Nisa Felicia, et all., Februari 2021)

Afrizal Sihotang, Kepala Ruang Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. *“Kurikulum Merdeka telah menguatkan mutu pendidikan Indonesia, karena memberikan kebebasan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam dan menyenangkan”* Pada press tour Kemendikbudristek pada Minggu di Rangkasbitung, Banten, katanya. Menurut Afrizal, Provinsi Banten telah memajukan akses pembelajaran melalui pemanfaatan minat dan kemampuan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperkenalkan kurikulum Merdeka.(Kemendikbudristek) pada tahun 2022 (Saepudin 2024).

Melalui studi wawancara singkat, Pusat Standar dan Kebijakan menerapkan kurikulum di SMK PK. Studi dilakukan di 21 satuan pendidikan di tiga provinsi: Provinsi Jawa Tengah (Kab. Tegal, dan Kab. Brebes), Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), dan Provinsi Banten (Wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang). Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengikuti metode Combined Group Discussion (DKT) evaluasi kurikulum. Pengamatan cepat juga dilakukan oleh penelitian untuk menyaksikan penggunaan SMK PK. Kurikulum otonom yang telah ditetapkan sekolah dapat memenuhi tuntutan siswa di masa depan, menurut 99% responden. (Yogi Anggraena, Nisa Felicia et all, Februari 2021).

2. Ketimpangan

Kesenjangan digital dan akses yang tidak merata adalah masalah utama yang mungkin menghambat penerapan kurikulum Merdeka. Ini adalah hasil dari jalur akses yang berbeda ke TIK, khususnya di daerah perkotaan dan pedesaan. Ada kemungkinan bahwa beberapa distrik atau sekolah kekurangan infrastruktur yang diperlukan untuk memungkinkan penggunaan teknologi di kelas. Atau, sekolah metropolitan dan murid-murid mereka dapat memperoleh manfaat lebih dari kurikulum Pembelajaran Gratis dan memiliki akses yang lebih besar ke teknologi. Karena kesenjangan digital, anak-anak di lokasi pedesaan atau kurang mampu mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya dan teknologi yang sama dengan siswa di daerah kaya atau metropolitan, memperburuk kesenjangan yang ada dalam akses ke pendidikan. Kondisi sarana prasarana, keadaan instruktur dan guru, keadaan siswa, lingkungan, keluarga, dan rintangan tertentu akibat kebijakan pemerintah semuanya memberikan tantangan bagi implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). (Nisa', Yoenanto, and Nawangsari 2023)

Jika analisis fakta di lapangan mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka (IKM) tidak sepenuhnya dilaksanakan karena berbagai masalah, sangat penting untuk melakukan evaluasi, dimulai dengan mengidentifikasi hambatan untuk memastikan bahwa perbaikannya ditentukan dengan benar. Hambatan TIK berasal dari empat sumber: 1) terkait dengan sumber daya; 2) SDM pendidik dan instruktur; 3) keadaan anak, keluarga, dan lingkungan; dan 4) disparitas kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut: 1) memanfaatkan dana pemerintah sebaik-baiknya; 2) memiliki instruktur yang berpartisipasi aktif dalam pelatihan TIK (lokakarya); 3) membangun hubungan yang kuat dengan semua siswa; dan; 4) menerapkan kebijakan sesuai Kurikulum Bebas jika terjadi ketimpangan kebijakan pemerintah.

Mengenai kritik Rocky terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, keberatan ini mencakup sejumlah topik yang

mewakili kekhawatiran dan sudut pandang beberapa pihak: Ketidakpastian dalam implementasi. Mungkin sulit untuk menggunakan kurikulum baru ini dengan sukses tanpa perencanaan yang cukup. Tidak adanya penilaian dan pengukuran kinerja, Beberapa mengkritik Kurikulum Bebas karena tidak memiliki mekanisme evaluasi yang jelas. Sulit untuk menentukan apakah program ini bermanfaat atau tidak tanpa adanya metrik kinerja yang andal. Kritik juga telah dikemukakan atas potensi kesenjangan pengetahuan yang ada di antara sekolah. Sekolah dengan sumber daya yang lebih besar dapat lebih siap untuk melaksanakan Kurikulum Gratis daripada sekolah dengan sumber daya yang lebih sedikit dalam hal infrastruktur dan staf. Beberapa orang bertanya-tanya apakah kurikulum Kebebasan cukup untuk mendidik siswa untuk tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berubah, atau jika itu tidak sesuai dengan persyaratan tersebut. Mungkin perlu untuk memodifikasi informasi dan keterampilan yang diajarkan dalam kurikulum ini untuk memenuhi tuntutan industri dan ekonomi saat ini. Kurangnya eksklusivitas, Ada kekhawatiran bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang berkebutuhan khusus tidak akan menemukan Kurikulum Kebebasan yang memadai. Pengamatan yang cermat diperlukan pada sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk anak-anak ini. Mengabaikan Sumber Daya Pendidikan Penting, Beberapa individu khawatir bahwa memprioritaskan kreativitas dan kemandirian dapat menyebabkan penurunan pengajaran mata pelajaran akademis dasar seperti sains, matematika, dan bahasa. (Syahbana et al. 2024).

Teknik ini melibatkan wawancara tertulis yang dilakukan menggunakan Google Form dan survei dengan lift. Sebanyak 514 pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam survei. Mayoritas responden (52,2%) berasal dari Provinsi Banten. Kesimpulan menarik penelitian ini adalah bahwa penggunaan akun learning.id telah menjadi kebijakan yang bermanfaat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta-fakta berikut: Google

Classroom, Google Form, dan Google Meet adalah tiga alat yang paling sering digunakan responden saat menggunakan akun learning.id mereka; (2) Sebagian besar responden menggunakan akun mereka untuk kegiatan sehari-hari, meskipun pada frekuensi yang berbeda; dan (3) Sebagian besar responden menerima pelatihan akun pembelajaran mereka dari Google Master, kolega, dan sumber lainnya. (Wahyudi and Suwandana 2022).

Selain itu, mengingat pentingnya Platform Pengajaran Gratis, setiap unit pendidikan harus menyebarkan informasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Sangat penting bahwa pendidik memiliki pemahaman yang cukup tentang kurikulum otonom dan pelaksanaannya, serta pengalaman langsung dengan kesenjangan akses dan kesenjangan digital di zaman kontemporer kita. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa unit pendidikan tidak akan menghadapi banyak hambatan besar saat menerapkan kurikulum otonom. Selain itu, kebingungan atau hambatan yang muncul saat menggunakan Platform Pengajaran Gratis dapat segera diselesaikan dengan mencari solusi. (Rohimat, Sanusi, dan Munthahanah 2022). Kesulitannya termasuk berbagai akses ke teknologi dan Internet di tempat-tempat tertentu, seperti provinsi Banten; mencari tahu bagaimana mengadaptasi teknik pengajaran yang efisien untuk ruang kelas virtual; dan berurusan dengan efek psikologis dari isolasi sosial. Ketika menghadapi tantangan ini, komunitas pendidikan secara keseluruhan, pemerintah, dan penyedia layanan pendidikan harus bersatu untuk memberikan dukungan yang kuat sehingga pembelajaran dapat terjadi secara efisien dan adil di seluruh Indonesia. (Lembong, Lumapow, dan Rotty 2023).

D. Kesimpulan

Efektivitas kurikulum dipengaruhi tidak hanya oleh desainnya tetapi juga oleh manajemen perubahan dan taktik yang digunakan untuk mendukung unit instruksional dan pendidik yang menerapkannya, oleh karena itu perencanaan kebijakan harus menyadari kompleksitas. Kesenjangan digital dan akses yang tidak merata adalah masalah utama yang mungkin menghambat penerapan kurikulum Merdeka. Melalui penggunaan kurikulum yang digunakan oleh sekolah, kurikulum pembelajaran otonom yang didefinisikan oleh kementerian ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap, kemampuan, dan minat mereka di sektor akademik atau non-akademik. Jika sekolah menggunakan kurikulum ini, diharapkan bahwa sekolah akan dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan lebih mudah tanpa mengorbankan kualitas pengajaran (Armando, Faizah, and Prawesti 2023). Menurut penelitian, Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk menjadi alat pengajaran inovatif yang meningkatkan sistem pendidikan Indonesia, khususnya di provinsi Banten. Generasi yang lebih siap untuk menangani tantangan dunia modern dapat diproduksi dengan bantuan ide kurikulum Merdeka, yang menekankan pada membantu siswa mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan semangat kewirausahaan mereka. Meskipun demikian, masih ada masalah dengan implementasi Kurikulum Merdeka, termasuk kesiapan guru dan sistem pendukung yang memadai. Kesimpulannya, untuk membawa keuntungan yang paling mungkin bagi lanskap pendidikan Indonesia, Kurikulum Merdeka harus terus dinilai dan ditingkatkan (Syahbana et al. 2024).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kajian menyeluruh tentang fitur-fitur pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, isu-isu dengan pendidikan dari era sebelumnya, dan berbagai kondisi geografis untuk membentuk kebijakan lanjutan yang mengatasi beberapa kekurangan dalam empat kebijakan yang telah dirumuskan. Ini akan memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif,

produktif, dan efisien. Menteri harus dengan senang hati mendengarkan dan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai latar belakang (Hr dan Wakia 2021). Elemen Utama dari Kurikulum Gratis: menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan otonomi kepada siswa atas pendidikan mereka, membantu siswa berkembang sebagai manusia, dan merampingkan kurikulum Menyediakan ruang bagi instruktur, Kurikulum gratis terus digunakan dan selalu dikembangkan (Saepudin 2024).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan dan ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan dukungan bagi penelitian dan publikasi karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- ELSEVIER. (2017). *Guide for Authors*. Retrieved 1 27, 2017, from ELSEVIER: <https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors>
- Elih Yuliah. Implementasi Kebijakan Pendidikan *The Implementation Of Education Policies*. "Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan." vol.3.no.2. (2020). Pdf. n.d.
- Wahyu Fatihah. Disemiasi Modul Ajar Pada Kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Proses Pembelajaran Dikelas. "Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma". vol.4no.1 (Maret 2023) <https://doi.org/10.26874/jakw.v4i1.273>. Pdf. n.d.
- Seif Malik Aziz. Juni 2023. "Implementasi Kbijakan Merdeka Belajar Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia." *JIRK: Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*. vol.3.no1. Pdf. n.d.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Amalia, Ira Nur, Sindy Kania Sulastri, and Muktiningsih Nurjayadi. n.d. "PERSPEKTIF GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA PADA KURIKULUM MERDEKA."
- Armando, Yosea Bagus, Dinar Faizah, and Dhilla Adhika Prawesti. 2023. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Capaian Hasil Belajar Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya." *ALSYS* 3 (6): 720–31. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i6.2035>.
- Widya Rizky Pratiwi. 10 April 2023. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Upaya Menciptakan Generasi Emas Bangsa" Artikel Radar Sulbar Pdf." n.d.
- Azza El Darman, Atiqa. 2021. "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU VAKSIN SEBAGAI SYARAT BERPERGIAN KE TEMPAT-TEMPAT PUBLIK PADA MASA PANDEMI." *Jurnal Analisis Kebijakan* 5 (2): 113–31. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>.
- Khaeroi, & Sabri. "Implementasi Kebijakan Mbkm Di Program Studi". (Curug, Serang-Banten. Media Madani. november 2021). Pdf." n.d.
- Hr, Sabriadi, and Nurul Wakia. 2021. "Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi" 11 (2).
- "Yogi Anggraena, Nisa Felicia, et all. Februari 2021. "Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran. pdf." nd
- Lembong, Jelly Maria, Harol Reflie Lumapow, and Viktory Nicodemus Joufree Rotty. 2023. "Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9 (2): 765–77. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>.

- Nafi'ah, Jamilatun, Dukan Jauhari Faruq, and Siti Mutmainah. n.d. "KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MADRASAH IBTIDAIYAH."
- Nisa', Syasya Khoirin, Nono Hery Yoenanto, and Nur Ainy Fardana Nawangsari. 2023. "Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar: Sebuah Kajian Literatur" 12 (3).
- Rohimat, Sonny, Sanusi Sanusi, and Munthahanah Munthahanah. 2022. "DISEMINASI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR UNTUK GURU SMA NEGERI 6 KOTA SERANG." *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (2): 1–9. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v4i2.2035>.
- Saepudin, Eli Apud. 2024. "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Serang (Studi Pada SMKN 3 Kota Serang)" 2 (1).
- Susilowati, Evi. n.d. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembentukan Karakter Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam."
- Suwardi, Suki. 2023. "PERSEPSI KEPALA SEKOLAH TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1 (5): 321–27. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i5.501>.
- Syahbana, Andrean, Masduki Asbari, Vinni Anggitia, and Hwang Andre. 2024. "Revolusi Pendidikan: Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan" 03 (02).
- Wahyudi, Dudi, and Endan Suwandana. 2022. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUN BELAJAR.ID KEMENDIKBUD OLEH TENAGA KEPENDIDIKAN." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 6 (1): 16–26. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.140>.
- Emerald Publishing. (2017). *Author Guidelines*. Retrieved 1 27, 2017, from Emerald Publishing: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/author_guidelines.htm?id=JHOM
- Pribadi, B. A., & Delfy, R. (2015). Implementasi Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) dalam Program Tutorial Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 16(2), 76-88. Retrieved from <http://jurnal.ut.ac.id/JPTJJ/article/view/408/421>
- Rohmah, N., Huda, M., & Kusmintardjo, A. Y. (2016). Strategi Peningkatan Kemampuan Dosen dalam Penulisan Karya Ilmiah (Studi Multi Kasus pada UNISDA dan STAUDRA di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan*, 1(7), 1312-1322. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6560/2795>